



Newsletter

BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Oktober 2014

Edisi 10/NL/10/2014

Daftar Isi:

	Hal
1. Mentan : "Minta Tidak Ada Kata Mundur Dari Target Swasembada Pangan.....	1
2. Tingkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Hasil Pertanian Lewat UPH dan RSK.....	3
3. Tingkatkan Produktivitas Pertanian Dengan Benih Hasil Produk BBPTP.....	4
4. Kementan Gunakan 4 Varietas Unggul Dalam Gerakan Tanam Padi Serentak 2014/2015.....	5
5. Sektor Pertanian Memiliki Peran Penting Dalam Rantai Pasokan Pangan	7
6. Kementan Berkomitmen Untuk Terus Tingkatkan Investasi Dalam Penelitian Pertanian...	7
7. Dukung Swasembada Daging, Kementan Launching Bibit Sapi Bersertifikat.....	8
8. Untuk Tingkatkan Pelayanan Ekspor Impor, Barantan Terapkan Sistem INSW.....	9
9. Kebutuhan Gula Nasional Belum Terpenuhi Secara Maksimal.....	11

Mentan : "Minta Tidak Ada Kata Mundur Dari Target Swasembada Pangan"

"Swasembada pangan harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk generasi Indonesia di masa depan. Negara dan bangsa harus mampu memproduksi aneka pangan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bagi rakyatnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal secara martabat sehingga tercapailah kedaulatan pangan"

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian, bertekad mencapai kedaulatan pangan karena kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri dalam menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat dalam menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

"Tujuan kedaulatan pangan adalah terciptanya kemandirian pangan. Negara dan bangsa harus mampu memproduksi aneka pangan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bagi rakyatnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal secara martabat" kata Menteri Pertanian, Arman Sulaiman usai acara serah terima jabatan Menteri di Kampus Kementan (28/10).



Mentan menerangkan perbedaan ketahanan pangan dengan kemandirian pangan yaitu kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

(Usai acara serah terima jabatan, Mentan Arman Sulaiman, menyampaikan tekadnya untuk terus melaksanakan program swasembada dengan prioritas jagung kedelai dan gula. (Doc.Humas))

"Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan," terang Mentan.

Agar terwujud kemandirian dan ketahanan pangan, Mentan berjanji akan meneruskan langkah pembangunan pertanian dalam mempertahankan dan mencapai swasembada pangan. Selain itu, tujuan pembangunan pertanian harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya petani, kedaulatan pangan, dan upaya pertanian menjadi penggerak ekonomi Indonesia.

"Swasembada pangan harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk generasi Indonesia di masa depan. Saya minta tidak ada kata mundur dari target swasembada pangan. Hak setiap rakyat untuk menikmati kecukupan pangan," kata Mentan.

Mentan mengatakan sesuai dengan capaian Kementan saat sekarang maka yang harus dilakukan bersama adalah mempertahankan dan mencapai swasembada pangan khususnya beras, jagung, kedelai, gula dan komoditas strategis lainnya. Bahkan hendaknya dengan surplus beras dan jagung cukup untuk cadangan pangan nasional dan ekspor. Swasembada kedelai dan gula kita upayakan dicapai pada periode lima tahun ke depan. "Apabila memungkinkan dalam 2-3 tahun capaian itu diupayakan dapat kita wujudkan, walau ada kendala-kendala untuk pencapaiannya akan tetapi ada alternatif-alternatif yang harus kita tempuh. Kita tidak boleh berhenti karena kendala tersebut banyak jalan dan cara lain yang bisa kita lakukan, saya optimis pertanian di Indonesia bisa dan mampu dalam menaklukkan tantangan dan menjadikannya sebagai peluang untuk mencapai sasaran yang telah dicita-citakan" kata Mentan.

Menurut Mentan, pihak Kementan sekarang mempunyai target mencanangkan swasembada pada empat komoditas strategis selama periode kepemimpinannya. Empat komoditas pangan yang tengah digenjot untuk mencapai swasembada adalah beras, jagung, kedelai dan gula. Khusus swasembada kedelai dan gula, akan tercapai selama lima tahun masa jabatannya. Sementara beras dan jagung akan tercapai dalam dua sampai tiga tahun.

Mentan menegaskan ada beberapa program prioritas yang akan dikerjakannya selama 5 tahun ke depan. Target utamanya diantaranya mencapai swasembada pangan dalam 3 tahun sampai 4 tahun ke depan. Selain menjaga swasembada beras, dirinya akan fokus untuk mengejar swasembada pangan jagung,

kedelai, dan gula. "Prioritas kita pada jagung, kedelai, dan gula, untuk mencapai target tersebut, ada langkah-langkah prioritas kementerian yaitu dengan meningkatkan irigasi, penyediaan bibit dan pupuk untuk petani, juga langkah-langkah jaminan pasar pasca panen. Sedangkan untuk mencapai swasembada pangan perlu memprioritaskan irigasi, bibit, mekanisasi, dan jaminan pasar," tegas Mentan.

Untuk mencapai tujuan swasembada pangan, Mentan menerangkan Kementan akan menerapkan empat kebijakan berbasis agribisnis kerakyatan. Pertama, kebijakan pengendalian atas impor pangan dan pengembangan ekspor pertanian berbasis pertanian dan industri dalam negeri. Kedua, penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian. Caranya lewat penganangan Indonesia berdaulat benih, pembangunan irigasi juga bendungan dan sarana jalan transportasi plus, penyediaan pasar secara merata. Ketiga, implementasi reforma agraria yakni petani memiliki hak atas kepemilikan lahan bagi petani. Terakhir, pembangunan agribisnis lewat bank khusus pertanian dan koperasi.

"Kementerian Pertanian perlu membangun kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan. Hal tersebut dilaksanakan melalui kebijakan pengendalian impor pangan serta pengembangan ekspor pertanian demi kepentingan pangan nasional, penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian, implementasi reforma agraria, dan pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus pertanian," terang Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa swasembada komoditi pangan akan terealisasi jika ada jaminan pasar di masa puncak panen raya. Jaminan pasar menjadi penting agar saat masa panen mencapai puncak, ada pasar yang dapat menampung komoditas tersebut. Di samping itu, dengan ketersediaan bibit, infrastruktur irigasi yang memadai dan mekanisasi pertanian modern akan menjadi faktor pendukung terciptanya swasembada pangan. "Saya cukup yakin kita bisa swasembada pangan dalam waktu empat tahun ke depan jika kita bisa memberi jaminan adanya pasar yang bisa menampung komoditi pangan di masa puncak panen, selain itu, untuk mencapai swasembada pangan kita perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian, ketersediaan bibit dan mekanisasi pertanian modern" jelas Mentan.

Mentan juga menjelaskan selain fokus pada prioritas pada swasembada pangan, perluasan wilayah juga menjadi fokus program kerja Kementerian Pertanian, karena fokus peningkatan produksi pertanian akan sejalan perluasan lahan pertanian. "Lahan sudah ada, untuk perluasan lahan pertanian ini, kami akan bersinergi dengan kementerian lain. Ini harus dilakukan terintegrasi dari semua kementerian terkait. Tidak boleh berdiri sendiri-sendiri," jelas Mentan.

Tingkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Hasil Pertanian Lewat UPH dan RSK

"Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA) adalah tantangan sekaligus peluang bagi produksi pertanian Indonesia untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian, Kementerian mengupayakan keberadaan Unit Pengolahan Hortikultura dan Rumah Sentra Kemasan di pedesaan"



(Mentan, Suswono saat menyampaikan sambutan tentang pengupayaan keberadaan Unit Pengolahan Hortikultura dan Rumah Sentra Kemasan di Kabupaten Pesawaran-Lampung. (Doc.Humas))

Berlakunya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA) harus diantisipasi sejak dini agar produksi pertanian Indonesia mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional, untuk itu Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mendorong para petani di seluruh Indonesia untuk mengolah hasil produksinya agar nilai tambahnya meningkat, dan daya saing hasil pertanian dengan pengembangan Unit Pengolahan Hortikultura (UPH) dan Rumah Sentra Kemasan (RSK). Keberadaan UPH dan RSK merupakan upaya yang tengah digalakkan Kementerian Pertanian dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian di pedesaan.

"Kita akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, karena itu saya menyambut baik upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian yang didukung Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan menghargai setiap upaya dan langkah maju ke arah pencapaian nilai tambah dan berdaya saing, seperti halnya melalui keberadaan Unit Pengolahan Hortikultura dan Rumah Sentra Kemasan yang ada di daerah Lampung. Keberadaannya secara langsung dapat dimanfaatkan para Poktan dan Gapoktan yang layak memperoleh nilai tambah dan produk segar maupun olahan yang dihasilkan, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya" kata Menteri Pertanian Suswono saat meresmikan UPH dan RSK pertanian di di Desa Wates Way Ray, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, (8/10).

Mentan mengemukakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA) bukanlah ancaman melainkan tantangan sekaligus peluang bagi produksi pertanian Indonesia untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. "Langkah Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian atau P2HP di Lampung saat ini adalah salah satu langkah antisipatif terhadap MEA 2015, dengan mendorong peningkatan daya saing produksi pertanian Indonesia di pasar domestik maupun internasional," kata Mentan

Menurut Mentan, daya saing produk Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Namun, ada banyak peluang yang kini tercipta berkat usaha dan kreativitas kelompok tani. Melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, pihaknya akan terus membantu petani agar bisa memproses, mengemas, sekaligus masuk ke pasar.

"Satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan produk Indonesia adalah bagaimana agar produk kita punya daya saing. Caranya dengan mengolah hasil pertanian untuk kemudian menjualnya dan bukan menjual hasil tani dalam keadaan mentah, karena yang akan untung adalah pembelinya yang akan mengolahnya lagi dengan keuntungan lebih tinggi," kata Mentan.

Untuk memperoleh nilai tambah dari produk segar maupun olahan yang dihasilkan, Mentan memaparkan upaya pemerintah yang memberikan pelatihan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani melalui UPH dan RSK.

"Cara itu diharapkan mampu menumbuhkan industri di pedesaan agar warganya tidak urbanisasi ke kota. Meskipun lahan pertanian sempit, tetap ada peluang memperoleh pendapatan berkat usaha dan kreativitas kelompok tani," papar Mentan.

Sedangkan dalam rangka mendukung program nilai tambah dan daya saing, Mentan mengungkapkan Kementerian Pertanian melalui Ditjen PPHP secara continue memfasilitasi sarana-prasarana pengolahan hasil pertanian. Selama periode 2010-2014 telah direalisasikan sebanyak 3.480 unit yang tersebar di 300 kabupaten / kota. Mulai tahun 2013 dibangun 5 Sentra Kemasan di propinsi; Jabar, Kalbar, Sulsel, Sulut dan NTB, dan pada tahun 2014 di 7 propinsi;

Lampung, Jateng, Sulteng, Banten, Gorontalo, NAD dan Bengkulu.

"Dengan difasilitasinya Rumah Sentra Kemasan maka unit usaha pengolahan hasil pertanian milik kelompok dapat memberi kemasan yang sesuai, baik dari aspek perlindungan produk maupun dari segi estetikanya dalam jumlah dan harga yang terjangkau. Saya mengharapkan bahwa ke depan kompetensi sentra Kemasan ini juga harus selalu ditingkatkan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi pengemasan" ungkap Mentan.

Mentan menjelaskan perlunya dukungan dari APBD tingkat satu maupun tingkat dua agar dapat terintegrasi dengan APBN dan saling melengkapi. Kondisi tersebut tentunya diharapkan dapat mempercepat peningkatan pertumbuhan perekonomian di pedesaan, terciptanya lapangan kerja, menurunnya kesenjangan sosial, yang pada

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan khususnya para petani.

Mentan juga memuji langkah petani daerah Lampung yang mampu meningkatkan pendapatannya melalui pengembangan potensi lokal seperti pisang dan ayam probiotik dengan pengolahan produksi berorientasi pasar sehingga mampu menembus pasar di luar Lampung. Apabila langkah serupa dilakukan oleh para petani di provinsi lainnya di Indonesia bukan mustahil Indonesia mampu menguasai pasar domestik dan internasional melalui produksi pertaniannya. "Namun perlu diingat, semangat para petani harus didukung kemauan politik dan politik anggaran untuk membangun pertanian, contohnya anggaran Kementerian Pertanian saat ini hanya sekitar Rp15 triliun, tentu tidak memadai mendukung pembangunan pertanian seluas Indonesia. Anggaran pertanian tidak seimbang dengan total APBN 2013, tidak sampai satu persennya," ujar Mentan.

Tingkatkan Produktivitas Pertanian Dengan Benih Hasil Produk BBPTP

"Salah satu keberhasilan produksi padi adalah intensifikasi pertanian yang terdiri dari penyediaan bibit unggul dan mekanisasi sehingga dalam pencapaian produksi beras yang tinggi peranan benih sangat penting. Oleh karena itu benih-benih berkelas yang dihasilkan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi harus dapat segera terdistribusi, diperbanyak dan tersedia di lahan petani agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian"

Hal yang patut dibanggakan, walau kepemilikan lahan pertaniannya lebih kecil, namun produktivitas lahan pertanian Indonesia termasuk tertinggi di Negara ASEAN. Produktivitas Indonesia tertinggi di ASEAN, yakni mencapai 5,2 ton/hektar. Ini lebih tinggi dibanding produktivitas petani di Thailand yang kurang dari 5 ton/hektar dan Myanmar yang jauh di bawah itu (3,7 ton per hektar).

"Tingginya produktivitas petani, tidak terlepas dari adanya penerapan teknologi, seperti bibit unggul yang dihasilkan pada peneliti Indonesia. Kita optimistis dengan penerapan teknologi yang tepat guna, akan meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan petani. Sehingga ketahanan pangan kita bisa berkelanjutan" kata Menteri Pertanian, Suswono usai peresmian Pengembangan Gedung Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPTP), di Sukamandi (30/9).

Mentan menuturkan peresmian Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, memberikan manfaat yang besar bagi pertanian. Tempat tersebut sempat dibangun pada 1983 dan pemerintahan sekarang merenovasi dan memperbaikinya. Balai penelitian tersebut memiliki sekitar 50 peneliti padi yang bekerja sama dengan sejumlah lembaga penelitian nasional. Sejak dibangun tempat riset padi tersebut telah menghasilkan 30 jenis lebih varietas padi, seperti padi tahan cuaca, banjir, dan kekeringan.



(Didampingi Kepala Balitbangtan Haryono, Mentan Suswono saat melakukan penandatanganan peresmian pengembangan Gedung Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi. (Doc.Humas))

"Fasilitas penelitian padi yang baru dipugar itu diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pertanian di Tanah Air sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Semoga ke depannya banyak lagi hasil riset yang ditemukan. Jangan hanya gedungnya yang baru, tapi varietas-varietas baru juga harus muncul, Balai tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan aspek pertanian Indonesia, khususnya yang sesuai dengan visi kedaulatan pangan" tutur Mentan.

Mentan menegaskan akan pentingnya peranan benih dalam pencapaian produksi beras yang tinggi. Salah satu keberhasilan produksi padi adalah intensifikasi pertanian yang antara lain terdiri dari penyediaan bibit unggul dan mekanisasi. "Oleh karena itu benih-benih berkelas (Breeder Seed) yang dihasilkan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi harus dapat segera terdistribusi, diperbanyak dan tersedia di lahan petani. Produk yang dihasilkan unit kerja badan litbang tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas pertanian" tegas Mentan

Sedangkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Mentan mengingatkan agar pemerintah mendatang harus memiliki kemauan politik yang kuat untuk membangun pertanian. Bukan hanya semangat, tapi juga perlu dukungan politik anggaran. "Kebutuhan dana penelitian dan pengembangan (litbang) pertanian sangat tinggi untuk menghasilkan benih unggul. Namun anggarannya masih minim, yaitu sekitar Rp 7 triliun selama lima tahun" ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa agar Indonesia dapat melakukan swasembada pangan atau berdaulat pangan, maka dibutuhkan anggaran sebesar 24 triliun rupiah per tahun. Di samping itu perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan pangan. Jika ingin merealisasikan swasembada pangan. Diperlukan upaya pemerintah dalam melanjutkan 7 program revitalisasi. Revitalisasi itu di antaranya, revitalisasi lahan, irigasi, teknologi, SDM dan pembiayaan bagi para petani.

"Tantangan untuk mencapai swasembada pangan ke depan ialah masih soal alih fungsi lahan pertanian. Masih maraknya alih fungsi lahan akan menggerus

lahan pertanian, khususnya pangan. Dalam lima tahun terakhir rata-rata produksi gabah kering giling (GKG) naik dari 65,76 juta ton pada 2010 menjadi 71,28 juta ton pada 2013. Proyeksi optimistis produksi GKG tahun ini sebesar 72 juta ton atau setara dengan 42 juta ton beras. Tetapi, selama lima tahun itu pula ada konversi lahan pertanian yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pemerintahan baru mendatang harus dapat menuntaskan persoalan tersebut" terang Mentan.

Dalam dialog dengan para Pemimpin Redaksi Media Cetak, dan Elektronik, Mentan mengemukakan kekhawatiran akan tingginya laju konversi lahan pertanian itu, mengingat dengan adanya ancaman pangan yang berasal dari konversi lahan yang tidak terkendali maka berapapun Badan Litbang Pertanian hasilkan bibit unggul akan percuma kalau lahannya habis. "Salah satu ancaman ketahanan pangan kita adalah adanya konversi lahan yang tidak terkendali. Betapapun litbang menghasilkan varietas unggul, tapi kalau lahan (produktif) habis dan yang tersisa lahan tidak produktif, maka akan sama saja. Laju konversi lahan pertanian ini perlu diperhatikan" kata Mentan.

Mentan mengatakan, laju konversi lahan pertanian hingga saat sekarang masih memprihatinkan. Jika tidak dibendung, maka konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman itu bisa mengancam ketahanan pangan nasional. Untuk itu, Kementerian Pertanian bertekad terus mengurangi laju konversi lahan pertanian tersebut, mengingat pembukaan lahan baru, tidak mudah, baik untuk pemanfaatan tanah terlantar maupun tanah ulayat. Namun kalau pemerintah berikutnya punya kemauan politik yang kuat maka berbagai kendala itu bisa diatasi.

Kementan Gunakan 4 Varietas Unggul Dalam Gerakan Tanam Padi Serentak 2014/2015

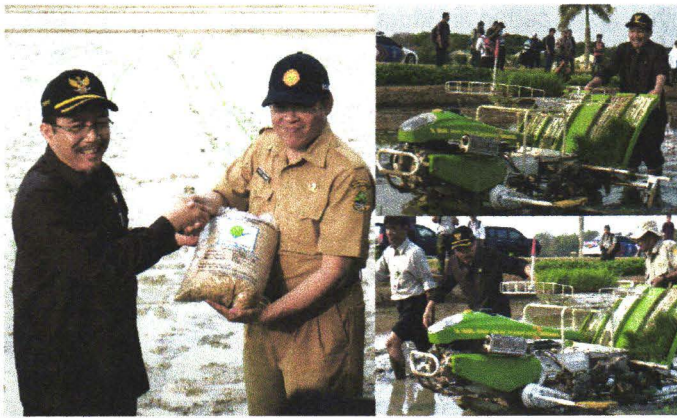
"Kementan menargetkan luas area tanam padi pada musim rending seluas 6 juta hektar didukung dengan Gerakan Tanam Padi Serentak 2014/2015, menggunakan empat varietas unggul tanaman padi yang tahan genangan air yaitu Inpari 30, Inpari 31, Inpari 32, dan Inpari 33. untuk mengantisipasi perubahan iklim, maupun kondisi tiap daerah di Indonesia yang berbeda beda"

Kementerian Pertanian mulai melaksanakan gerakan tanam padi serentak 2014/2015. Gerakan Tanam tersebut sekaligus menandai pencahangan dimulainya musim tanam 2014/2015 dalam menghadapi musim hujan yang diperkirakan akan berlangsung antara Oktober 2014 hingga Maret 2015. Tanam padi serentak tersebut menggunakan empat varietas unggul tanaman padi yang tahan genangan air yaitu Inpari 30, Inpari 31, Inpari 32, dan Inpari 33.

"Musim tanam padi pertama atau musim rending, yaitu Oktober 2014-Maret 2015, telah dimulai. Kementerian Pertanian menargetkan luas area tanam

padi musim rending ini seluas 6 juta hektar. Sedangkan pencahangan ini merupakan upaya memanfaatkan benih untuk mengantisipasi perubahan iklim, maupun kondisi tiap daerah di Indonesia yang berbeda beda," kata Menteri Pertanian Suswono saat usai melakukan tanam perdana di areal sawah Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi Kabupaten Subang (30/9).

Mentan menjelaskan varietas padi unggul baru tersebut memang dikhususkan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan. Sebab perubahan iklim yang nyata, di satu sisi banyak daerah dilanda



(Mentan Suswono menyerahkan varietas padi unggulan yang tahan genangan air dan mencoba menanamnya dengan alat tanam Indo Jarwo Transplanter saat gerakan tanam serentak di Sukamandi. (Doc.Humas))

kekeringan dan sisi lain ada juga daerah yang terkena genangan. Varietas-varietas padi unggul hasil balai besar penelitian tanaman padi Sukamandi ini beragam, bisa dipilih menyesuaikan dengan iklim.

“Untuk areal sawah yang daerah termasuk kering bisa memanfaatkan varietas infogo yang dulu dikenal padi gogo. Kemudian daerah yang sering tergenang air, bisa menggunakan varietas infari. Saat ini varietas terbarunya infari 30 relatif tahan terhadap genangan air. Sedangkan untuk daerah rawa bisa menggunakan varietas infara. Itu merupakan upaya yang kita lakukan dari sisi benih mengantisipasi perubahan iklim, maupun kondisi tiap daerah di Indonesia yang berbeda beda,” jelas Mentan.

Untuk menghadapi musim tanam rending, mulai dari kesiapan benih, pengelolaan dan tata kelola air, kesiapan pupuk, hingga penanganan setelah panen, Mentan mengungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah persiapan dan antisipasi. Pihak Kementan juga telah bekerja sama dengan asosiasi pemerintah di provinsi Indonesia untuk pengembangan pertanian modern masing-masing 100.000 hektar di setiap provinsi.

“Rencananya pada 6 Oktober 2014, akan ditandatangani Kesepakatan antara pihak kementan dengan asosiasi pemerintah provinsi. Adapun proyek percontohan di provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan memulai pengembangan pertanian modern dalam satu kawasan 100.000 hektar di Sulawesi Selatan. Kami akan bantu alat tanam dan alat pertanian modern lain,” ungkap Mentan.

Terkait alat tanam, saat melakukan tanam padi, Mentan menggunakan alat tanam hasil karya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, yang diberi nama Indo Jarwo Transplanter, yakni alat yang akan membantu petani menanam benih padi dengan sistem jajar legowo (jarwo). Indo Jarwo Transplanter diluncurkan pertama kali oleh Mentan pada awal November 2013 di Kementerian Pertanian

Menurut Mentan alat tanam Indo Jarwo Transplanter dapat membantu agar produktivitas pertanian terjaga lewat metoda tanam jajar legowo 2:1. Dengan alat dan metoda tersebut, Kementerian Pertanian mengklaim mampu menghasilkan jumlah populasi tanaman 213.300 tanaman per hektare. Jumlah sebesar 33,31% lebih banyak dibanding metoda tanam tegel 25 cm x 25 cm yang populasi tanaman hanya 160 ribu per hektare.

“Hingga September 2013, metoda ini telah diaplikasikan pada lahan seluas 1.613.550 hektare. Dari uji coba tersebut ditemukan peningkatan produktivitas rata-rata. Waktu yang dibutuhkan untuk menanam 1 hektare bibit padi hanya enam setengah atau setara dengan kemampuan 20 orang. Tapi tenaga kerja yang dibutuhkan jauh lebih sedikit, hanya 1/10 dari biasanya. Yang biasanya 30 orang untuk satu hektare, sekarang cukup tiga orang saja,” ujar Mentan.

Selain dengan alat Indo Jarwo Transplanter, Mentan menuturkan metoda jajar legowo diterapkan juga dengan menggunakan alat Indo Combine Harvester, yang digunakan pasca-panen. Alat tersebut juga karya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.

“Dengan menggunakan kedua alat itu, susut hasil (losses) kurang dari 2%. Susut hasil terjadi pada kegiatan pemanenan, perontokan, pengangkutan, pengeringan, penggilingan, penyimpanan, dan pemasaran” tutur Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa saat sekarang Kementerian Pertanian tengah mengejar target surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014. diharapkan penerapan alat dan mesin pertanian sebagai suplemen, substitutor, dalam proses produksi bisa membuka peluang bisnis pembibitan padi dan jasa sewa mesin di pedesaan. Apalagi, upah tenaga kerja juga semakin mahal dan tenaga kerja untuk menggarap sawah juga kini semakin sulit dicari. Menurut catatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sawah mencapai 30 persen dari total kebutuhan tenaga kerja tanam.

“Hal ini menyebabkan biaya produksi membengkak, sehingga mengurangi pendapatan petani. Rata-rata petani mengeluarkan ongkos Rp 1 juta rupiah untuk menanam 1 hektare lahan padi. Akan halnya bila menggunakan Indo Jarwo Transplanter, ongkos tanam memang bertambah sekitar Rp 300 per hektare. Namun, ya, itu tadi, tenaga kerja yang dibutuhkan jauh lebih sedikit, hanya 1/10 dari biasanya. Juga mampu menghasilkan jumlah populasi tanaman 33,31% lebih banyak dibanding metoda biasanya serta lebih banyak waktu yang dihemat” jelas Mentan.

Sektor Pertanian Memiliki Peran Penting Dalam Rantai Pasokan Pangan

“Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan rantai pasokan pangan yang berkelanjutan di Indonesia karena produksi pertanian menjamin keberlanjutan rantai suplai pangan. Selain itu rantai pasokan produksi pertanian tidak hanya terkait dengan arus barang, tetapi juga arus informasi dan keuangan secara berkelanjutan”



(Mentan Suswono saat menyampaikan paparan tentang pentingnya rantai pasokan pangan yang berkelanjutan di Indonesia. (Doc.Humas))

Pemerintah Indonesia menyadari sektor pertanian memiliki peran penting dan strategis bagi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. Pada tahun 2014, sebagai respon Pemerintah Indonesia terhadap peringatan FAO akan adanya kemungkinan kerawanan pangan global, maka pencapaian target swasembada produksi tanaman pangan harus terlaksana untuk dapat memperkuat ketahanan pangan dalam negeri dan meningkatkan ketersediaan pangan agar dapat menjadi pemasok pangan dunia.

“Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dalam rangka mencapai target surplus yang cukup signifikan pada komoditi beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi dan juga meningkatkan kesejahteraan petani pada tahun 2014. Pemerintah Indonesia melakukan dua kali lipat upaya untuk meningkatkan produksi pangan pokok untuk memiliki kelebihan yang signifikan dari makanan pokok sebagai cadangan pangan nasional” kata Menteri Pertanian, Suswono saat menjadi pembicara acara The Aid and International Development Forum di Jakarta (9/10).

Menurut Mentan, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan rantai pasokan pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Produksi pertanian juga menjamin keberlanjutan rantai suplai pangan. Pada akhir 2014 sektor pertanian diperkirakan akan tumbuh pada 3,62-3,75% dengan surplus neraca perdagangan sebesar US \$ 24,3-54,5 miliar. Produksi pangan diproyeksikan meningkat pada tingkat yang signifikan. Target swasembada produksi pangan beras, jagung, kedelai dan daging

memiliki realisasi yang sangat potensial; dan upaya tambahan masih diperlukan untuk mencapai swasembada gula. “Perhatian kita adalah bagaimana meningkatkan tingkat produktivitas, terutama dalam lima komoditas seperti, beras, kacang kedelai, jagung, tebu dan daging sapi. Sejalan dengan upaya di atas, pemerintah kita merumuskan beberapa program melalui peningkatan sistem irigasi, menciptakan lahan baru lahan pertanian khususnya sub-optimal, pemanfaatan varietas tanaman baru unggul, dan teknologi implementasi untuk budidaya tanaman” ujar Mentan.

Mentan menerangkan untuk mendukung upaya peningkatan produk pertanian, pemerintah Indonesia memiliki program khusus untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan mengembangkan agroindustri skala kecil di pedesaan yang terintegrasi dengan pengembangan program regional. Selain itu, kerjasama antar daerah untuk menumbuhkan permintaan pasar agregat dalam skala regional juga upaya lain untuk mengembangkan pusat baru agroindustri. “Upaya pemerintah itu sesuai dengan program Kementerian Pertanian untuk mendukung Jaringan Kerja Pasokan Pangan Berkelanjutan, yang mengembangkan strategi yang dinyatakan dalam Tujuh Gema Revitalisasi meliputi Revitalisasi Tanah, Revitalisasi Bibit dan Pembibitan; Revitalisasi Sarana dan Prasarana; Revitalisasi Sumber Daya Manusia; Revitalisasi Pembiayaan Petani, Revitalisasi Lembaga Petani, dan Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir” terang Mentan.

Terkait dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2012, tentang cetak biru Sistem Logistik Pembangunan Nasional, Mentan menjelaskan rantai pasokan produksi pertanian tidak hanya terkait dengan arus barang, tetapi juga arus informasi dan keuangan secara berkelanjutan. Semua kegiatan dalam rantai pasokan melibatkan pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan jasa pengiriman sesuai dengan jenis, kualitas, kuantitas, waktu dan tempat yang dibutuhkan oleh pelanggan, dengan cara yang aman, efektif dan efisien, dari titik asal ke titik tujuan. “Kegiatan logistik melibatkan berbagai pihak yang dapat dikategorikan menjadi lima kelompok, yaitu, konsumen, pemain logistik, penyedia layanan logistik, pendukung logistik dan pemerintah. Semua ini membutuhkan infrastruktur logistik yang terdiri dari node logistik dan link logistik yang berfungsi untuk

memindahkan barang dari titik asal ke titik tujuan. Logistik node dapat menjadi pemain logistik serta konsumen, sedangkan link logistik meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan” jelas Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa pengembangan Sistem Logistik Nasional berdasarkan enam faktor pendorong utama yang saling terkait, yaitu Penggerak Komoditas Utama; Pelaku dan Penyedia Layanan Logistik, Infrastruktur Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Peraturan dan Kebijakan. “Semua faktor ini bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pembentukan sistem logistik yang berkelanjutan kompetitif bahan baku pertanian, baik di pasar domestik regional dan pasar global. Semua kegiatan ini diharapkan untuk memimpin kesejahteraan masyarakat. Komoditas utama dapat didorong pada dasar dan strategis komoditas, serta komoditas ekspor pertanian utama” jelas Mentan.

Dalam Forum tersebut, Mentan menegaskan Kementerian Pertanian juga berkomitmen untuk meningkatkan pengakuan ilmiah penelitian pertanian Indonesia dan dampak penerapan teknologi. Peningkatan sistem produksi untuk komoditas strategis dan mitigasi perubahan iklim dan adaptasi teknologi akan menjadi salah satu prioritas. Inovasi dan teknologi tidak hanya akan perlu untuk

meningkatkan efisiensi penggunaan input diubah menjadi output, tetapi juga melestarikan sumber daya alam yang langka. “Teknologi Pertanian telah memberi kontribusi pada pertumbuhan yang kuat dalam produktivitas pertanian di Indonesia, khususnya untuk para petani kecil. Sebagian besar teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Selama lima tahun terakhir instansi tersebut telah menghasilkan inovasi yang sukses di bidang teknologi yang meliputi 196 varietas unggul padi, 46 varietas jagung unggul tinggi, 64 varietas kedelai unggul tinggi, 7 strain baru untuk kambing, domba, ayam, dan itik, 13 teknologi vaksin, 8 antigen, 10 kit diagnostik dan teknik pengujian penyakit, dan 15 varietas unggul baru (VUB) untuk tebu” tegas Mentan.

Mentan menambahkan adopsi teknologi pertanian selalu menjadi tantangan. Penerapan teknologi pertanian bahkan tantangan yang lebih besar karena sebagian besar teknologi pengetahuan intensif yang melayani adaptasi lokal oleh petani. Untuk mempercepat adopsi teknologi pertanian, Badan Litbang Pertanian mengembangkan struktur unik pada setiap provinsi. “Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) menyediakan link potensial antara pusat penelitian berbasis komoditas pusat dan pusat ekstensi berbasis kabupaten. Fungsi utama dari lembaga provinsi untuk menilai teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal” kata Mentan.

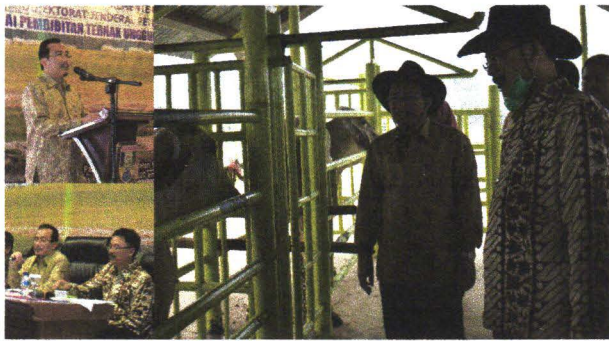
Dukung Swasembada Daging, Kementan Launching Bibit Sapi Bersertifikasi

“Bibit sapi Brahman yang diluncurkan Kementan merupakan hasil dari proses panjang hingga disertifikasi oleh Ls Pro Benih dan Bibit Ternak. Adanya bibit berstandar tentunya dengan menambahkan populasi betina maka tujuan utama swasembada daging kerbau dan sapi dapat segera terwujud, dibuktikan dengan telah dicapainya swasembada semen beku pada 2012 dan swasembada sapi pejantan unggul pada 2013”

Setelah melalui proses panjang, Kementerian Pertanian akhirnya berhasil meluncurkan 22 ekor sapi Brahman terdiri dari 8 ekor sapi jantan dan 14 ekor sapi betina yang telah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Produk (Ls Pro) Benih Ternak. Jumlah tersebut menambah total ternak sapi bibit yang telah disertifikasi sejak didirikannya Lembaga Sertifikasi Produk (Ls Pro) Benih dan Bibit Ternak menjadi 233 ekor. “Bibit sapi Brahman yang kita launching merupakan hasil dari proses panjang hingga disertifikasi oleh Ls Pro Benih dan Bibit Ternak. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2009 dalam Pasal 13 ayat (4) bahwa setiap benih atau bibit beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit,” kata Menteri Pertanian, Suswono saat usai meluncurkan bibit sapi Brahman yang telah disertifikasi di Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Sembawa, Banyuasin-Sumsel, (14/10).

Mentan menuturkan biaya membeli satu ekor pejantan dari luar negeri untuk diambil spermanya membutuhkan biaya yang cukup tinggi yang mencapai ratusan juta. Dengan melimpahnya bibit berstandar atau bibit unggul, telah membuat Indonesia sejak tahun 2013 tidak lagi mengimpor pejantan yang sebelumnya dilakukan. Sudah menjadi komitmen kuat bagi pemerintah dalam memperbaiki perbibitan ternak untuk mendukung pembangunan peternakan dalam negeri,

“Ini untuk mendukung swasembada bibit yang telah kita canangkan, dengan bibit berstandar tentunya kita tinggal menambah populasi betina sehingga tujuan utama swasembada daging kerbau dan sapi dapat segera terwujud, dibuktikan dengan telah dicapainya swasembada semen beku pada 2012 dan swasembada sapi pejantan unggul pada 2013” tutur Mentan.



(Mentan Suswono didampingi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwanto melakukan launching bibit sapi Brahman yang telah bersertifikasi di BPTU Sembawa - Sumatera Selatan. (Doc.Humas))

Mentan mengatakan perbaikan perbibitan merupakan aspek strategis dalam perbaikan genetika ternak, guna mendukung peningkatan kualitas ternak. Apabila genetika ternak sudah bagus, maka tinggal didukung oleh pakan berkualitas, serta manajemen budidaya dan pelayanan kesehatan hewan yang baik untuk menghasilkan produk ternak yang optimal.

"Indonesia sangat kaya akan sumber daya genetika hewan lokal sebagai modal bangsa untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber pangan asal ternak, karena itu patut kita jaga sebagai aset bangsa, dengan memberi perlindungan hukum terhadap rumpun atau galur ternak berdasarkan SK Menteri Pertanian RI sejak 2010, Rumpun atau galur yang ditetapkan dan dilepas selanjutnya didaftarkan ke Food and Agriculture Organization (FAO)" kata Mentan.

Terkait Balai Pembibitan Ternak Unggul, menurut Mentan, pelaku usaha di bidang tersebut sangat minim atau sedikit karena biayanya besar, sementara marjennya kecil, oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah agar bisa mensuplai bibit-bibit unggul yang bisa disebar ke masyarakat. Bibit sapi Brahman yang dikeluarkan BPTUHTP diharapkan menurunkan ciri-ciri tertentu jadi kedepan tidak hanya BPTUHTP saja yang bersertifikat akan tetapi bibit-bibit yang unggul dihasilkan oleh masyarakat

Mentan juga berharap, kedepannya tidak hanya ternak dari BPTU-HPT saja yang di launching sebagai bibit

ternak bersertifikat, tapi juga yang dihasilkan oleh peternak di masyarakat. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan UPT pembibitan dapat menjadi ujung tombak dalam penyediaan benih dan bibit ternak. "Caranya dengan meningkatkan peran BPTU-HPT, sehingga bisa menjadi pusat percontohan bagi masyarakat dalam hal pembibitan, pakan dan kesehatan hewan. Disamping itu, UPT yang berada di bawahnya juga harus ikut membantu mengawal kegiatan pembibitan dan transfer teknologi yang dilakukan masyarakat, agar terbangun hubungan yang sinergis dalam pengembangan pembibitan secara nasional," harap Mentan.

Menanggapi keinginan Mentan tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Syukur Iwanto menjelaskan pihaknya memiliki 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan yang terdiri dari 2 Balai Inseminasi Buatan, 1 Balai Embrio Transfer, serta 7 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHTP). "Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui UPT Perbibitan telah menjadi ujung tombak penyediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas, terbukti bibit sapi Brahman ini merupakan hasil dari proses panjang hingga disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) Benih dan Bibit Ternak," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan juga memaparkan sapi betina bibit bersertifikat digunakan sebagai indukan penghasil ternak bibit. Sedangkan sapi pejantan bibit unggul bersertifikat, digunakan sebagai penghasil semen beku di Balai Inseminasi Buatan dan sebagai pejantan pemacek dalam intensifikasi kawin alam (INKA). Semen beku yang dihasilkan dari sapi pejantan bibit bersertifikat tersebut, digunakan untuk optimalisasi peningkatan kelahiran ternak yang memiliki genetika baik melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB). "Teknologi inseminasi buatan dan kualitas semen beku Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju. Hal ini terbukti dengan banyaknya negara yang belajar di Balai Inseminasi Buatan Indonesia, dan mengimpor semen beku produksi dalam negeri," papar Dirjen Peternakan dan Kesehatan.

Untuk Tingkatkan Pelayanan Ekspor Impor, Barantan Terapkan Sistem INSW

"Untuk mempercepat proses arus barang baik komoditi ekspor maupun impor yang selama ini dalam pengiriman komoditi ekspor dan impor agak terhambat akibat administrasi yang birokrasinya tidak satu pintu, mengatasi penyelundupan dan gangguan impor lainnya, mengoptimalkan penerimaan negara (PBBP) dan memberikan kepastian bagian kegiatan para pelaku usaha maka Barantan perlu menggunakan Sistem INSW"

Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian melakukan uji coba layanan sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang dapat mempermudah pelayanan ekspor import produk pertanian secara online. Sebenarnya sejak tahun 2007

Sistem informasi Barantan telah terintegrasi dalam sistem INSW dan menjadi bagian penting dalam percepatan arus barang di pelabuhan dan bandara. Barantan sendiri memiliki dua inhouse sistem yang dibangun dalam kerangka INSW yakni Electronic



(Mentan, Suswono didampingi Kepala Barantan Banun Harpini melihat berbagai uji coba layanan sistem Indonesia National Single Window di Kantor Balai Besar Karantina II Medan. (Doc.Humas))

System for Plan Quarantine (E-PLAQ) dan Electronic System for Quarantine Veteriner (E-QVET).

“Untuk meningkatkan sistem kecepatan proses layanan terkait ekspor import komoditas pertanian, serta meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan komoditas pertanian maka pemanfaatan teknologi Informasi pada kegiatan operasional perkarantina telah menjadi pilar dalam penyelenggaraan perkarantina. Badan Karantina Pertanian sebagai instansi yang melindungi sumberdaya alam hayati kini harus mereposisi diri sebagai instrumen strategis dalam penerapan Sanitary and Phytosanitary Measures.” kata Menteri Pertanian, Suswono saat meresmikan Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang. (2/10)

Dalam acara yang dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan, Kadis Pertanian Sumut dan Kadis Pertanian Kabupaten Deli Serdang, Mentan memaparkan Balai Karantina Pertanian menggunakan Sistem INSW bertujuan untuk mempercepat proses arus barang baik komoditi ekspor maupun impor yang selama ini, dalam pengiriman komoditi ekspor dan impor tersebut agak terhambat akibat administrasi birokrasinya yang tidak satu pintu. Selain itu penyelundupan dan gangguan impor lainnya agar dapat lebih diatasi, penerimaan negara (PBBP) dapat lebih optimal dan memberikan kepastian bagian kegiatan para pelaku usaha. “Sistem ini ditujukan untuk meningkatkan kecepatan proses layanan terkait ekspor impor komoditas pertanian, minimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan komoditas pertanian, peningkatan validitas dan akurasi data maupun informasi serta menjadi instrumen pengawasan atas seluruh layanan yang diberikan. Sistem ini menjadi instrumen penting peningkatan pelayanan publik Badan Karantina Pertanian untuk menjadi lebih transparan, akuntabel dan berkualitas,” papar Mentan.

Terkait peresmian Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan di Bandara Kualanamu, Mentan

menyatakan keberadaan Balai Karantina Pertanian dan sistem INSW akan mendorong produk pertanian Indonesia menjadi lebih berdaya saing, pelaksanaan preferensi perdagangan termasuk Free Trade Area (FTA) akan lebih terkendali, penyelundupan dan gangguan impor lainnya dapat lebih diatasi, penerimaan negara (PBBP) dapat lebih optimal dan memberikan kepastian bagi kegiatan usaha di Indonesia.

“Dengan adanya layanan sistem INSW mandatory di Bandara Kualanamu, maka in house system pelayanan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan otomatis terintegrasi ke dalam system INSW. Kedepan, diharapkan kantor pelayanan ini memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mendorong dan mengakselerasi esport komoditas unggulan provinsi Sumut melalui penerapan SPS dan layanan karantina di tempat produksi,” kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan berharap peresmian Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan sebagai komitmen peningkatan pelayanan publik Badan Karantina Pertanian. Pembangunan fasilitas kantor modern dengan dilengkapi fasilitas laboratorium dan sistem informasi telah disediakan secara terintegrasi. Pelayanan Karantina kepada masyarakat dilakukan secara online. Kecepatan akses dan kemudahan pelayanan bagi pengguna jasa karantina pertanian menjadi komitmen dalam pelayanan bagi masyarakat.

Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini juga menjelaskan, penerapan sistem INSW yang terkoneksi dengan sejumlah daerah juga bagian dari persiapan Indonesia dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pelayanan INSW sendiri telah diterapkan sejak Tahun 2007 di 4 pelabuhan utama di Indonesia yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas dan Pelabuhan Belawan serta 1 Bandar Udara yaitu Bandara Soekarno Hatta.

“Setelah diterapkan di Bandara Kualanamu, dalam waktu dekat layanan INSW akan diterapkan di 6 pelabuhan dan bandara guna mendorong percepatan arus barang (flow of goods) yakni Pelabuhan Dumai Pekanbaru, Panjang Lampung, Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Benoa Bali, Pelabuhan Bitung Manado, Bandara Ngurah Rai Denpasar,” jelas Kepala Barantan

Sementara itu Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi menambahkan, Sumut merupakan sentra holtikultura di Indonesia. Bahkan sayur dan buah dari Sumut telah menembus pasar ekspor seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea bahkan hingga ke Ukraina. Nilai ekspor palwija Sumut pada periode April 2014 tercatat mencapai US\$ 1.254.314. Sedang sayuran

US\$ 1.830.519 dan ekspor buah dari Sumut tercatat US\$ 688.497.

"Dengan adanya karantina Pertanian diharapkan dapat meningkatkan volume ekspor sekaligus menjadiantisipasi dan proteksi masuknya produk pertanian

tidak berkualitas dari luar negeri, saya berharap, INSW dapat mendorong kelancaran dan keceatan arus barang eskportimport serta mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam proses penanganan dokumen karantina pertanian" ujar Wagub Sumut.

Kebutuhan Gula Nasional Belum Terpenuhi Secara Maksimal

"Kebutuhan gula nasional masih belum maksimal bisa dipenuhi padahal sejak tahun 2009 program swasembada gula telah dicanangkan oleh Pemerintah tetapi program tersebut banyak mengalami kendala dan hal terkait penghambat swasembada gula yakni penambahan lahan, revitalisasi pabrik gula, dan pembangunan pabrik baru kewenangan penanganannya tidak berada di Kementan"



(Mentan, Suswono saat meresmikan Stasiun Gilingan di Pabrik Gula Blora Jawa Timur
(Doc.Humas))

Kebutuhan gula nasional untuk konsumsi rumah tangga bisa dipenuhi oleh produksi gula nasional, sedangkan untuk kebutuhan gula untuk industri masih belum bisa dipenuhi. Untuk itu Pemerintah telah mencanangkan program swasembada gula sejak tahun 2009. Demikian diungkapkan oleh Menteri Pertanian, Suswono saat usai meresmikan Stasiun Gilingan di Pabrik Gula (PG) Blora Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Blora, Jawa Timur (11/10).

Di hadapan para petani tebu Blora, Mentan mengakui, Pertama adalah kendala lahan. karena dibutuhkan setidaknya tambahan lahan 350.000 hektare khusus untuk menanam tebu. "Untuk mencapai swasembada gula perlu tambahan lahan seluas 350 ribu hektar, tetapi hingga sekarang tambahan lahan itu tidak ada, sehingga luas panen tebu sejak dicanangkan 2009 hingga sekarang tidak bertambah" ujar Mentan.

Menurut Mentan selain penambahan lahan tebu, untuk bisa memenuhi swasembada gula dan kebutuhan industri, juga perlu melakukan revitalisasi pabrik gula yang sudah ada, sebab saat sekarang pabrik gula yang ada merupakan peninggalan Belanda sehingga dengan adanya revitalisasi bisa memacu peningkatan jumlah produksi. Pabrik gula (PG) di Pulau Jawa sebenarnya sudah ada sejak zaman Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1826 di Pekalongan (Sragi).

"Revitalisasi pabrik gula yang ada sangat penting karena pabrik gula yang ada merupakan pabrik gula peninggalan Belanda. Mesin-mesinnya perlu diremajakan agar dapat meningkatkan rendemen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi gula nasional. Namun langkah revitalisasi pabrik gula juga tidak dilakukan. Sehingga pabrik-pabrik yang ada masih beroperasi menggunakan mesin-mesin lama. Saat ini ada 52 pabrik gula BUMN sebesar 10 persen sudah direvitalisasi, itu pun tidak dapat rendemen. Diharapkan ada 20 pabrik gula baru untuk kita bisa mencapai swasembada gula" kata Mentan.

Terkait masalah pembangunan pabrik gula baru. Mentan memperkirakan untuk mencapai swasembada gula diperlukan 20-25 pabrik gula baru. Tetapi sejak 2009 baru satu pabrik yang dibangun, yakni PT Gula Multi Manis. Untuk itu dirinya mengapresiasi langkah PT Gula Multi Manis tersebut. "Dengan membangun pabrik gula baru, akan meningkatkan produksi gula, dapat mengurangi impor dan membantu pemerintah dalam program swasembada gula. PT Gula Multi Manis diklaim satu-satunya pabrik gula baru yang berdiri sejak 5 tahun terakhir atau sejak 2009" imbuh Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa Pabrik Gula yang benar-benar baru dibangun hanya ada tiga daerah yaitu di Sumatra Selatan, Lampung dan Blora. Untuk itu dirinya berharap agar PG Blora yang mulai beroperasi bisa meningkatkan produksi gula dan sekaligus mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar pabrik, terlebih lagi dengan adanya stasiun gilingan yang baru dan mesin yang ada menggunakan teknologi komputer, dan pengepakan gula. "Di pulau Jawa untuk ekspansi pabrik gula sulit ke depannya karena dengan adanya pabrik gula maka petani mempunyai pilihan sehingga menjadi terpacu semangatnya. Tetapi kalau pabrik gula tidak efisien dalam mendukung petani, sebaiknya ditutup saja. Inilah persyaratan-persyaratan yang belum bisa terpenuhi. Namun, kita harus akui masih ada pihak yang 'semangat' khususnya dari kalangan importir untuk import gula," jelas Mentan.



BIRO UMUM DAN HUMAS

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan

Telp./Fax : 021 780 4457 (ext.2316)